

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Republic of Korea (ROK), atau umum dikenal sebagai Korea Selatan, adalah salah satu *middle power* yang memiliki pengaruh signifikan dalam banyak aspek strategis di percaturan internasional, dengan menempati peringkat kesepuluh ekonomi terbesar di dunia dan kekuatan militer terkuat ketujuh yang mempunyai teknologi canggih dan *soft power* yang signifikan.¹ Korea Selatan memiliki lingkungan strategisnya tersendiri yang dibentuk oleh pengalaman sejarah dan dinamika geopolitik dengan mitra tradisional di sekitar Semenanjung Korea, yakni Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Jepang, dan Korea Utara.² Beberapa negara tersebut memainkan peran dominan dalam urusan luar negeri Korea Selatan, seperti isu perdamaian antar-Korea, stabilitas regional, dan perekonomian nasional negara satu ini. Dinamika kompleks di sekitar Semenanjung Korea telah memengaruhi pandangan geopolitik Korea Selatan dalam menentukan orientasi kebijakan luar negeri dan strategi regionalnya. Akibatnya, negara ini cenderung memiliki fokus yang terbatas untuk mengembangkan politik luar negerinya. Dengan demikian, metafora “*a shrimp among whales*” dinilai relevan untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi Korea Selatan dalam mengelola politik luar negerinya.

¹ ‘Korea’s GDP Ranks 10th Worldwide in 2019’, *The Korea Times*, 2020 <https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2024/08/602_290188.html> [accessed 8 January 2024].

² Jaehyon Lee, ‘Korean Geopolitical Outlook and Its Relations with ASEAN’, in *Navigating Uncharted Waters: Security Cooperation between ROK and ASEAN*, ed. by Waffaa Kharisma and Andrew W. Mantong (Jakarta: CSIS Indonesia, 2022): 35.

Selama tujuh dekade terakhir, kebijakan luar negeri dan agenda diplomasi Korea Selatan telah terpusat pada negara-negara adidaya di sekitar Semenanjung Korea. Namun, rivalitas politik kekuasaan di kawasan yang memburuk di beberapa tahun ini telah menempatkan Korea Selatan dalam posisi sulit. Korea Selatan terjebak dalam perselisihan regional yang melibatkan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Keputusan Korea Selatan untuk mengerahkan sistem rudal anti-balistik, *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD), memicu respon keras dari Tiongkok yang diikuti oleh pemberlakuan sanksi ekonomi terhadap Korea Selatan pada tahun 2016-2017.³ Di saat bersamaan, meningkatnya proteksionisme ekonomi AS dengan kebijakan *America First* di bawah administrasi Donald Trump semakin memperparah kestabilan Korea Selatan.⁴ Lalu, perselisihan bilateral dengan Jepang yang berakar dari permasalahan historis, terkait isu pekerja paksa atau *Jugun Ianfu* yang dipekerjakan selama pendudukan Jepang di Korea lampau, juga menyebabkan Jepang menerapkan pemboikotan terhadap Korea Selatan.

Dilema geopolitik yang dialami oleh Korea Selatan akibat meningkatnya kompleksitas di kawasan memberikan sinyal kepada pemerintahan baru untuk memperbarui strategi luar negeri guna meminimalisir ketegangan yang mengancam kepentingan ekonomi dan keamanan Korea Selatan dari negara-negara mitra utamanya. Korea Selatan kemudian berupaya mengatasi krisis dalam hubungan luar negerinya ini dengan memperluas ikatan strategis dan mencari mitra alternatif di luar lingkup kemitraan tradisionalnya. Hal ini tercermin melalui upaya perluasan

³ Lee Jaehyon, 'Korea's New Southern Policy: Motivations of "Peace Cooperation" and Implications for the Korean Peninsula', *The Asan Institute for Policy Studies*, 2019, 8.

⁴ EFSAS, *South Korea's New Southern Policy in Southeast Asia and India: Limitations and Opportunities*, No. 2 (Amsterdam: European Foundation for South Asian Studies, 2023), 5.

kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam *New Southern Policy* (NSP) atau Kebijakan Baru ke Arah Selatan.

Inisiatif kebijakan NSP pertama kali diumumkan oleh Presiden Moon Jae-in dalam momentum *Korea-Indonesia Business Forum* di Jakarta, selama kunjungannya ke beberapa negara Asia Tenggara pada bulan November 2017. Saat pidatonya untuk mengumumkan inisiatif NSP, Moon Jae-in menyatakan bahwa, “Korean diplomacy in Asia has always leaned more toward United States, Japan, China, and Russia, and it is time for South Korea to expand to new horizons” yang kemudian disasar ke arah selatan.⁵ Secara umum, istilah ‘southern’ dalam NSP merujuk pada jangkauan keterlibatan Korea Selatan untuk seluruh negara yang terletak di wilayah selatan Korea.⁶ Meskipun demikian, sebagaimana yang tercantum dalam *e-booklet New Southern Policy Information* yang diterbitkan oleh *Presidential Committee on New Southern Policy*, dalam hal ini secara spesifik negara-negara yang diprioritaskan sebagai negara target NSP tingkat pertama adalah *ASEAN member states* dan India.⁷ Di bawah skema NSP, mereka diperhitungkan sebagai *rising power* yang potensial. Hal ini disebabkan oleh kedudukan ASEAN dan India yang berada di urutan kedua dalam lanskap strategis Korea Selatan, setelah AS, Tiongkok, dan Jepang.

NSP merupakan paradigma baru dalam inisiatif kebijakan luar negeri Korea Selatan, di masa Pemerintahan Moon Jae-in, yang bertujuan untuk

⁵ Darren Whiteside, ‘South Korea’s Moon Unveils New Focus on Southeast Asia’, *Reuters*, 2017 <<https://www.reuters.com/article/us-indonesia-southkorea/south-koreas-moon-unveils-new-focus-on-southeast-asia-idUSKBN1D90OC/>> [accessed 10 February 2024].

⁶ Tunchinmang Langel, ‘Geopolitical Expanses of ROK’s Foreign Policy Frontiers’, in *The Republic of Korea’s Foreign Policy Approach: From New Southern Policy to the Indo-Pacific Strategy*, 1st edition (New Delhi, India: Indian Council of World Affairs, 2023), pp. 15.

⁷ Presidential Committee on New Southern Policy, ‘New Southern Policy Information’, 2019, pp. 7 <https://dkiapcss.edu/wp-content/uploads/2020/02/Republic_of_Korea-New_Southern_Policy_Information_Booklet.pdf>.

meningkatkan kerja sama Korea Selatan dengan ASEAN dan India ke tingkat yang setara dengan empat mitra tradisional Korea Selatan.⁸ Dengan kata lain, kebijakan ini memiliki visi untuk memperluas hubungan luar negeri Korea Selatan dengan negara-negara ASEAN sebagai alternatif pengganti hubungan kerja samanya dengan mitra lama, yakni AS, Tiongkok, dan Jepang, yang mulai riskan. Penerapan kebijakan NSP didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu *a community of people, a community of prosperity, dan a community of peace*.⁹ NSP menandai upaya pertama Korea Selatan secara eksplisit untuk memajukan hubungan dengan negara-negara ASEAN ke tahap yang sama dengan hubungan diplomatiknya bersama para pemangku kepentingan utama di sekitar Semenanjung Korea.¹⁰

Korea Selatan secara khusus menetapkan *ASEAN Member States* sebagai parameter utama dalam implementasi kebijakan NSP.¹¹ Dalam konteks ini, ASEAN tetap menjadi prioritas inti bagi para pembuat kebijakan di Korea Selatan. ASEAN adalah kawasan ekonomi terbesar kelima di dunia dan akan terus tumbuh. Oleh karena itu, banyak negara yang ingin membina hubungan dengan kawasan ini, termasuk Korea Selatan. ASEAN sendiri merupakan mitra dagang terbesar kedua bagi Korea Selatan, setelah Tiongkok. Selain itu, *Korean Wave*, yang juga dikenal sebagai *Hallyu*, juga mengakar kuat di kawasan ini. ASEAN adalah pasar *Hallyu* terbesar kedua setelah Asia Timur, dengan potensi lima kali lipat lebih besar

⁸ Presidential Committee on New Southern Policy, 'New Southern Policy Information', 2019, 2 <https://dkiapcss.edu/wpcontent/uploads/2020/02/Republic_of_KoreaNew_Southern_Policy_Information_Booklet.pdf>.

⁹ Kementerian Luar Negeri, 'Connecting The Connectivity in The Indo-Pacific: Indian Ocean and Rim ChASEAN+3er', 2019, 41.

¹⁰ Yoon Ah Oh, 'Korea's New Southern Policy: Progress, Problems, and Prospects', *East-West Center*, 2020 <<https://www.eastwestcenter.org/publications/koreas-new-southern-policy-progress-problems-and-prospects>> [diakses 12 February 2024].

¹¹ Thi Ha Hoang and Glenn Ong, 'Assessing the ROK's New Southern Policy towards ASEAN', *Perspective*, No. 7 (2020), 3 <https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/pdfs/ISEAS_Perspective_2020_7.pdf>.

dibandingkan pasar Amerika Utara dan sepuluh kali lipat dari pasar Eropa.¹² Popularitas budaya pop Korea di ASEAN, baik itu *K-drama*, *K-pop*, hingga *K-beauty*, telah membawa sejumlah pengaruh signifikan. Dengan besarnya potensi yang dimiliki ASEAN, Korea Selatan berharap negara-negara ASEAN akan menjadi *the next China* yang menyediakan peluang pertumbuhan ekonomi dan politik Korea Selatan.¹³

Hubungan antara ASEAN dengan Korea Selatan telah berlangsung selama tiga dekade terakhir, terhitung sejak Korea Selatan menjadi *sectoral dialogue partner* ASEAN pada November 1989. ASEAN sebelumnya tidak pernah menjadi fokus dalam agenda diplomasi atau kebijakan luar negeri Korea Selatan, meskipun ia adalah mitra dagang utama untuk Korea Selatan. Di sisi lain, frekuensi hubungan ASEAN dengan Korea Selatan masih tergolong minim apabila dibandingkan dengan beberapa mitra dialog ASEAN lainnya di kawasan yang sama, terutama Jepang dan Tiongkok.¹⁴ Namun, situasi tersebut perlahan berganti seiring dengan adanya perubahan prioritas Korea Selatan dengan mengintegrasikan negara-negara ASEAN sebagai bagian utama dalam agenda kebijakan luar negerinya, menyusul kedudukan AS, Tiongkok, dan Jepang, yang mengindikasikan jika Korea Selatan telah menetapkan sejumlah agenda kepentingan nasionalnya terhadap kawasan ini serta mempertimbangkan nilai strategis kawasan ASEAN sebagai wilayah implementasi kebijakan NSP.

¹² Primastuti Handayani, 'Korean Wave in ASEAN Keeps Going Strong', *The Jakarta Post*, 2019 <<https://www.thejakartapost.com/news/2019/04/25/korean-wave-in-asean-keeps-going-strong.html>> [diakses 10 February 2024].

¹³ Leif-eric Easley, 'South Korea's "New Southern Policy": Economic Diversification with Strategic and Social Dimensions', *Asia Insights*, 5.1 (2018): 3.

¹⁴ Nurliana Kamaruddin & Aaron Denison, 'Great Power Rivalries Push South Korea and ASEAN Closer', *Universiti Malaya*, 2019 <<https://aei.um.edu.my/great-power-rivalries-push-south-korea-and-asean-closer>> [diakses 8 January 2024].

1.2 Rumusan Masalah

Selama bertahun-tahun, kebijakan luar negeri Korea Selatan hanya diprioritaskan pada persoalan Semenanjung Korea dan hubungan dengan negara-negara besar, yang secara tidak langsung telah membatasi otonominya untuk mengembangkan strategi luar negeri dengan lebih heterogen. Namun, seiring dengan meningkatnya persaingan geopolitik, Korea Selatan dihadapkan pada kebutuhan untuk mencari alternatif diplomatik. Di bawah pemerintahan Moon Jae-in, Korea Selatan memperbarui orientasi kebijakan luar negerinya dengan menjadikan ASEAN sebagai fokus utama melalui *New Southern Policy*. NSP menandai pergeseran orientasi hubungan luar negeri dari yang sebelumnya berpusat pada AS, Tiongkok, dan Jepang menuju ASEAN sebagai wilayah strategis baru dalam diplomasi Korea Selatan. Meskipun Korea Selatan telah menjalin dialog dengan ASEAN sejak 1989, namun baru pada tahun 2017 ASEAN menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negerinya melalui NSP. Langkah ini menandakan komitmen yang lebih besar untuk membangun ASEAN sebagai mitra strategis dalam politik luar negeri Korea Selatan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah penelitian, maka pertanyaan penelitian yang hendak dijawab ialah apa kepentingan yang ingin dicapai Korea Selatan terhadap *ASEAN Member States* melalui implementasi *New Southern Policy*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut ialah beberapa tujuan dari penelitian ini, yakni:

1. Mendeskripsikan *New Southern Policy* sebagai bagian dari dinamika politik luar negeri Korea Selatan.

2. Menganalisis kepentingan Korea Selatan terhadap ASEAN dan negara-negara anggotanya melalui *New Southern Policy*.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian ini, diantaranya:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat berkontribusi dalam perkembangan bidang keilmuan Hubungan Internasional, khususnya dalam bidang kajian politik luar negeri dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca seputar kebijakan luar negeri Korea Selatan di kawasan ASEAN melalui *New Southern Policy*.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bacaan tentang kebijakan luar negeri dan diharapkan dapat menjadi *lesson learnt* bagi negara-negara *middle power* dalam penyusunan kebijakan luar negeri.

1.6 Studi Pustaka

Terdapat lima penelitian terdahulu yang peneliti rujuk sebagai bahan perbandingan dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian ini. Studi pustaka pertama adalah buku yang ditulis oleh Uk Heo dan Terence Roehrig pada tahun 2014, dengan judul *South Korea's Rise: Economic Development, Power, and Foreign Relations*.¹⁵ Melalui tulisannya, Heo dan Roehrig berupaya menjelaskan bagaimana perkembangan ekonomi Korea Selatan dapat memengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan internasional dari suatu negara, dengan mengambil kasus seputar Korea Selatan. Pada tahun 1950-an, Korea Selatan merupakan salah

¹⁵ Uk Heo and Terence Roehrig, *South Korea's Rise: Economic Development, Power, and Foreign Relations*, *South Korea's Rise* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014): 1–189 <<https://doi.org/10.1017/cbo9780511998355.002>>.

satu negara termiskin di dunia dengan GDP per kapita hanya US\$60 dan sekitar setengah anggaran pemerintahnya berasal dari bantuan AS. Namun, lima dekade kemudian, Korea Selatan berhasil bertransformasi menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia sebagai negara ekonomi terbesar ke-12 di dunia dengan total GDP mencapai US\$ 1,156 triliun. Kemudian, pada tahun 1996 Korea Selatan bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan menjadi anggota Development Assistance Committee (DAC) OECD pada tahun 2010. Dengan ini, Korea Selatan menjadi satu-satunya negara di dunia yang berhasil mengubah status dari *aid recipient* menjadi *international donor* melalui keanggotaan di OECD–DAC. Perkembangan ekonomi Korea Selatan membawa demokratisasi. Seiring dengan berkembangnya perekonomian mulai tahun 1960-an, tingkat pendidikan meningkat, industrialisasi dan urbanisasi berkembang, dan masyarakat menuntut demokrasi yang berpuncak pada transisi demokratisasi di Korea Selatan pada tahun 1987.

Perubahan peran Korea Selatan dalam hubungan internasional juga mencakup peningkatan keterlibatan negara ini dalam jaringan internasional. Korea Selatan terpilih menjadi anggota *United Nations Security Council* (UNSC) dengan berkontribusi pada operasi penjaga perdamaian PBB dan menjadi tuan rumah *G20 Summit* dan *Nuclear Security Summit*, serta bergabung dengan *Combined Task Force 151* untuk operasi pemberantasan pembajakan internasional di pantai Somalia. Namun, dari sekian banyak peran aktif Korea Selatan dalam organisasi multilateral, yang paling mengesankan ialah keanggotaan Korea Selatan dalam OECD–DAC, sebuah organisasi elit donor di dunia.

Pembangunan ekonomi di Korea Selatan telah membawa dampak yang signifikan dalam perkembangan kebijakan luar negeri dan hubungan internasional negara ini. Keberhasilan transisi ekonomi Korea Selatan mampu meningkatkan status, pengaruh, dan kekuasaan yang dimilikinya dalam komunitas internasional. Berangkat dari kasus Korea Selatan tersebut, Heo dan Roehrig melihat jika pembangunan ekonomi dapat memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara dengan menyediakan opsi dan alat kebijakan luar negeri tambahan melalui bantuan dan investasi luar negeri, transfer teknologi, keahlian pembangunan, dan kemampuan militer. Keberhasilan pembangunan ekonomi juga menciptakan peluang yang lebih besar bagi pengaruh politik luar negeri suatu negara melalui peningkatan peran dalam organisasi internasional yang memerlukan status negara maju (*advanced-nation*), seperti OECD dan G20.

Tulisan ini memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti terkait bagaimana pengaruh kebangkitan ekonomi dalam evolusi politik luar negeri Korea Selatan yang berstatus *middle power* saat ini. Adapun perbedaan antara substansi tulisan ini dengan penelitian yang dilakukan adalah fokus isu yang dikaji, di mana Heo dan Roehrig menjelaskan hubungan antara pembangunan ekonomi dan perubahan kebijakan luar negeri Korea Selatan, sementara itu peneliti akan mengkaji tentang arah baru dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan terkait kepentingannya terhadap ASEAN dalam *New Southern Policy*.

Studi pustaka kedua adalah artikel jurnal berjudul *South Korea's "New Southern Policy": Economic Diversification with Strategic and Social*

Dimensions yang ditulis oleh Leif-Eric Easley pada tahun 2018.¹⁶ Artikel ini menjelaskan tentang signifikansi NSP sebagai kebijakan luar negeri Korea Selatan yang bertujuan untuk memperkuat hubungan lintas dimensi ekonomi, strategis, dan sosial dengan negara-negara tetangga di Indo-Pasifik, utamanya di Asia Tenggara dan India. NSP bertujuan untuk meningkatkan hubungan strategis Korea Selatan dengan negara-negara ASEAN dan India ke tingkat yang setara dengan empat negara mitra utama bagi Korea Selatan, yakni Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang dan Rusia. Korea Selatan berupaya mencapai *balanced diplomacy* melalui NSP, bukan dengan menurunkan hubungan dengan negara-negara besar, melainkan dengan meningkatkan hubungan strategis terhadap mitra potensial di kawasan Indo-Pasifik.

Melalui tulisannya, Easley menyatakan motivasi utama munculnya NSP adalah untuk mengurangi ketergantungan Korea Selatan pada negara-negara besar di Asia, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, maupun Jepang. Kebijakan baru ini berupaya untuk memitigasi risiko persaingan ekonomi yang berlangsung antar negara-negara besar. Melalui kebijakan NSP, Korea Selatan menargetkan ASEAN dan India untuk menjadi “the next China” dengan potensi yang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Korea. Selain peluang diversifikasi ekonomi, NSP juga dimotivasi oleh masalah keamanan. Dengan kebijakan ini, Korea Selatan juga berupaya untuk meningkatkan kontribusi negara-negara ASEAN dalam rekonsiliasi antar-Korea yang merupakan warisan Perang Dingin di Asia. Faktor lain yang mendukung keberlanjutan kebijakan tersebut adalah bahwa

¹⁶ Easley, ‘South Korea’s “New Southern Policy”: Economic Diversification with Strategic and Social Dimensions.’

kebijakan tersebut dibangun di atas proses dari bawah ke atas dan interaksi internasional.

Prinsip inti dari NSP adalah diplomasi yang berpusat pada rakyat, berbeda dengan perdamaian dan kemakmuran tradisional yang berpusat pada negara. Terkait hal ini, Easley menilai jika pendekatan kebijakan Korea Selatan yang berpusat pada rakyat melalui pilar 'people', dimaksudkan tidak hanya untuk meningkatkan kekuatan lunak negara tersebut tetapi juga untuk menghadapi tantangan demografi jangka panjang. Asia Timur Laut menghadapi masyarakat yang menua dengan cepat dan tingkat kelahiran yang sangat rendah. Populasi pemuda yang besar di India dan Asia Tenggara dapat membantu mengatasi masalah ini dengan menyediakan lebih banyak pelajar, wisatawan, dan konsumen. Interaksi utara-selatan yang lebih besar juga menjanjikan untuk membantu mengatasi stereotip negatif yang mengakar dalam kultur masyarakat Korea Selatan tentang pekerja asing, pernikahan internasional, kemiskinan, dan keamanan pariwisata ke wilayah Selatan.

Di satu sisi, tulisan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, dengan keduanya yang membahas seputar kebijakan NSP. Pembahasan dalam artikel jurnal ini memberikan gambaran kepada peneliti terkait makna dan motif dibalik kemunculan NSP dalam inisiatif kebijakan luar negeri Korea Selatan. Di sisi lain, perbedaan antara artikel jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada analisis NSP. Fokus analisis dalam artikel jurnal ini ditekankan pada determinan NSP, sementara itu peneliti menganalisis kepentingan seperti apa yang ingin dicapai Korea Selatan ke ASEAN melalui NSP.

Studi pustaka ketiga adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Lee Jaehyon pada tahun 2019 dengan judul *Korea's New Southern Policy: Motivations of 'Peace Cooperation' and Implications for the Korean Peninsula*.¹⁷ Melalui artikel ini, Jaehyon menjelaskan tentang motivasi strategis dibalik implementasi NSP ke ASEAN dan bagaimana implikasi pilar 'peace' NSP dalam kerja sama perdamaian antara ASEAN dan Korea Selatan dengan menganalisis peluang ASEAN dalam isu unifikasi Semenanjung Korea. Terbentuknya kebijakan NSP berawal dari ketidakkonsistenan pemerintah Korea Selatan dalam kebijakan luar negeri terhadap ASEAN. Pasca Pemerintahan Kim Dae-jung, kebijakan luar negeri Korea Selatan sering kali mengabaikan ASEAN sebagai salah satu fokus utama kebijakan Korea Selatan. Hal ini berdampak pada berkurangnya kehadiran Korea Selatan sebagai *middle power* di wilayah Asia Tenggara. Ketidaksesuaian antara tren pertumbuhan ekonomi dan *soft power* Korea Selatan dan ruang lingkup kebijakan luar negeri yang terus menyusut menjadi salah satu latar belakang dicetuskannya NSP oleh Pemerintahan Moon Jae-in. Hal ini mencerminkan apa yang hilang dalam kebijakan luar negeri Korea sebelumnya dan kebijakan terhadap ASEAN.

Kebijakan luar negeri dan agenda diplomasi Korea Selatan sejauh ini secara tidak proporsional hanya terfokus pada Semenanjung Korea dan empat mitra utamanya, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang dan Rusia. Namun, persaingan strategis antara AS dan Tiongkok memberikan Korea Selatan tekanan untuk menentukan pilihan antara dua negara adidaya tersebut. Dengan adanya

¹⁷ Jaehyon 'Korea's New Southern Policy: Motivations of "Peace Cooperation" and Implications for the Korean Peninsula.'

rivalitas ini, ruang otonom Korea Selatan semakin mengecil. Untuk mengurangi ketegangan di sekitar Semenanjung Korea dan memperluas otonomi strategisnya, negara-negara ASEAN menjadi alternatif pilihan strategis nomor satu bagi Korea Selatan secara Asia Tenggara merupakan wilayah geografis paling dekat dengan Korea Selatan, setelah wilayah Asia Timur. Terkait hal ini, Jaehyon menilai bahwa motivasi lainnya dibalik kemunculan NSP ialah untuk memberikan status yang layak bagi ASEAN dalam agenda luar negeri Korea Selatan.

Hal yang membedakan NSP dari pendekatan pemerintahan Korea Selatan sebelumnya terhadap ASEAN adalah *peace cooperation* yang menggantikan istilah *political-security cooperation* yang lebih tradisional, di antara prinsip-prinsip 3P (*people, prosperity, peace*) dalam NSP. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja kerja sama keamanan antara ASEAN dan Korea Selatan yang sebelumnya dinilai masih belum optimal. Dalam artikel jurnal ini juga dijelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi kurang memuaskannya kinerja kerja sama keamanan antara ASEAN dan Korea Selatan. Hal ini mencakup kurangnya kepekaan kedua belah pihak terhadap kerja sama keamanan, kurangnya ancaman keamanan bersama antara ASEAN dan Korea, dan batasan struktural bahwa negara-negara ASEAN dan Korea merupakan *middle power* dan *small power* di kawasan. Jaehyon juga memandang isu Semenanjung Korea sebagai benang merah dalam kerja sama perdamaian antara Korea Selatan dan ASEAN. ASEAN memiliki potensi besar untuk menjadi kontributor penting bagi pembangunan perdamaian di Semenanjung Korea.

Berdasarkan penjelasan dalam artikel jurnal ini, peneliti mendapatkan gambaran terkait perkembangan kebijakan luar negeri Korea Selatan, pandangan

Korea Selatan terhadap ASEAN, sisi lain dari kemunculan NSP, apa yang membedakan NSP dengan kebijakan Korea Selatan di ASEAN sebelumnya, dan bagaimana peluang kerja sama perdamaian antara Korea Selatan dan ASEAN yang terbentuk dari NSP. Perbedaan artikel jurnal dengan penelitian yang dilakukan terletak pada cakupan isunya, di mana artikel jurnal ini cenderung membahas NSP dari lingkup keamanan, sedangkan peneliti menganalisis NSP secara keseluruhan dari tiga pilarkerja sama yang diupayakannya, yakni *people* (masyarakat), *prosperity* (kesejahteraan), dan *peace* (perdamaian).

Studi pustaka keempat adalah artikel jurnal berjudul *Korea's 'New Southern Policy' Towards India: An Analysis* yang ditulis oleh Ranjit Kumar Dhawan pada tahun 2020.¹⁸ Melalui artikel jurnal ini, Ranjit berupaya menganalisis pengaruh NSP dalam hubungan bilateral antara Korea Selatan dan India. Korea Selatan melalui NSP mencoba untuk mendiversifikasi strategi hubungan luar negerinya dengan mengurangi ketergantungan pada empat kekuatan besar di kawasan Asia Timur. Berkaitan dengan perubahan kebijakan ini, India diproyeksikan sebagai salah satu mitra utama Korea Selatan. Namun, setelah dua tahun berlangsung, kebijakan ini dinilai tidak memiliki pengaruh signifikan dalam hubungan bilateral Korea Selatan dengan India. Artikel ini berpendapat bahwa implementasi NSP terhadap New Delhi masih memiliki cakupan yang terbatas dan sebagian besar hanya berfokus pada pengembangan hubungan ekonomi daripada membangun kerja sama keamanan antara kedua negara.

¹⁸ Ranjit Kumar Dhawan, 'Korea's "New Southern Policy" Towards India: An Analysis', *Jadavpur Journal of International Relations*, 24.1 (2020): 53–72 <<https://doi.org/10.1177/0973598420906248>>.

Korea Selatan dihadapkan dengan situasi sulit akibat persaingan dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Tiongkok. Sanksi ekonomi dan tindakan koersif yang dilakukan Tiongkok sebagai respon dari masalah pemasangan sistem antimisil buatan AS di Korea Selatan pada tahun 2017 telah memberikan pelajaran penting bagi Korea Selatan untuk mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada pasar Tiongkok. Demikian pula, meningkatnya proteksionisme ekonomi AS di bawah Pemerintahan Donald Trump menciptakan masalah bagi ekspor Korea Selatan. Akibatnya, Korea Selatan mencari mitra ekonomi alternatif dan India adalah salah satunya. Kepentingan utama Korea Selatan di India adalah ekonomi. Melalui gagasan NSP, Korea Selatan berupaya menggantikan kedudukan Tiongkok dengan India sebagai mitra utama dalam perekonomian Korea Selatan.

Dhawan menilai perkembangan hubungan strategis antara Korea Selatan dan India akan sulit melampaui statusnya saat ini. Terlepas dari beberapa perubahan positif yang terlihat di bidang ekonomi dan budaya, Korea Selatan dan India belum mencapai kemajuan signifikan di bidang lainnya. Masalah infrastruktur yang buruk, korupsi, nepotisme, dan lambatnya kinerja birokrasi di India menjadi hambatan utama bagi Korea Selatan untuk mengembangkan NSP di India. Hal ini juga memvalidasi fakta bahwa meskipun ada retorika dalam NSP, faktanya India mungkin tidak akan bisa menggantikan pentingnya Tiongkok bagi Korea Selatan di masa mendatang. Hingga saat itu, Korea Selatan akan mitra alternatif di ASEAN dan negara-negara lain di dunia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mendapatkan gambaran bagaimana capaian implementasi NSP Korea Selatan di India, dengan melihat sektor yang menjadi fokus penerapannya. Hal ini dapat menjadi bahan

perbandingan untuk melihat proses implementasi NSP terhadap ASEAN dan negara-negara anggotanya. Selain itu, peneliti juga dapat mengukur sejauh mana pengaruh yang dibawa oleh NSP dalam hubungan bilateral India dan Korea Selatan. Perbedaan artikel jurnal dengan penelitian yang dilakukan terletak pada objek yang diteliti. Dhawan dalam artikel jurnal ini memaparkan analisis NSP terhadap India. Sementara, penelitian ini akan menganalisis dinamika NSP terhadap negara-negara ASEAN.

Studi pustaka terakhir merupakan artikel jurnal yang ditulis oleh Hoang Thi Ha and Glenn Ong pada tahun 2020 dengan judul *Assessing the ROK's New Southern Policy towards ASEAN*.¹⁹ Artikel ini berupaya mengkaji upaya akses NSP Korea Selatan terhadap ASEAN, mulai dari tujuan ditetapkannya NSP bagi ASEAN, penjelasan terkait bidang kerja sama antara Korea Selatan dan ASEAN di bawah kerangka NSP, hingga ulasan menyeluruh terkait pelaksanaan NSP di ASEAN. Secara keseluruhan, NSP mewakili kelanjutan dari kebijakan-kebijakan Korea Selatan sebelumnya terhadap Asia Tenggara, yang pertama kali berkembang pada masa pemerintahan Presiden Kim Dae-jung pada akhir tahun 1990-an lalu sempat terputus, dan kembali berlangsung di bawah pemerintahan Presiden Lee Myung-bak pada tahun 2009. Di bawah pemerintahan Moon Jae-In, *ASEAN member states* (AMS) diberikan prioritas lebih dibandingkan negara-negara Asia lainnya dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan.

Tujuan NSP adalah untuk mengintensifkan hubungan Korea Selatan dengan negara-negara ASEAN ke tingkat yang lebih tinggi dan setara dengan empat kekuatan besar di sekitar Semenanjung Korea. Dalam analisisnya, Hoang

¹⁹ Hoang and Ong, 'Assessing the ROK's New Southern Policy towards ASEAN.'

dan Ong berpendapat jika inisiatif NSP terhadap ASEAN lebih didorong oleh kepentingan ekonomi yang kuat dibandingkan dengan kepentingan strategis. Keterlibatan ekonomi ASEAN dan Korea Selatan yang kuat didukung oleh kebutuhan Korea Selatan untuk mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada pasar Amerika dan Tiongkok, dan besarnya daya tarik ekonomi ASEAN. Bantuan perdagangan, investasi, dan pembangunan Korea Selatan di Asia Tenggara terus berkembang.

Artikel jurnal ini berkontribusi dalam penelitian melalui pemahaman bagaimana upaya Korea Selatan dalam mengimplementasikan kebijakan NSP terhadap ASEAN. Perbedaan antara substansi artikel jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada jangkauan waktu implementasi kebijakan, di mana artikel ini mengkaji upaya implementasi NSP terhadap ASEAN dalam dua tahun pelaksanaannya, sedangkan peneliti menitikberatkan kajian pada keseluruhan waktu implementasi NSP terhadap ASEAN, dalam hal ini peneliti menemukan adanya perubahan NSP menjadi NSP Plus yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan selama berlangsungnya pandemi COVID-19.

1.7 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan bagian penting dari desain penelitian yang berfungsi sebagai panduan utama dengan menyatukan semua aspek penelitian melalui proses yang menjelaskan hubungan, keterputusan, tumpang tindih, dan ketegangan dalam konteks fenomena yang membentuk sebuah penelitian. Untuk menganalisis apa kepentingan yang hendak dicapai oleh Korea Selatan di ASEAN melalui kebijakan NSP, peneliti menggunakan model kepentingan nasional dari Charles Chong-Han Wu.

1.7.1 Kepentingan Nasional

Terdapat banyak konsep sentral dalam bidang ilmu sosial yang tidak dapat diukur dengan mudah, termasuk interpretasi tentang kepentingan nasional. Hans J. Morgenthau menilai jika kepentingan nasional ditentukan berdasarkan kekuasaan yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain, entah itu secara politik, militer, atau ekonomi.²⁰ Secara umum, konsep kepentingan nasional sulit untuk diartikan dalam satu kata atau kalimat saja. Negara-negara memiliki tipe yang kepentingan yang berbeda-beda, umumnya terdapat kepentingan keamanan dan kesejahteraan ekonomi. Kepentingan yang berbeda akan menghasilkan *output* keputusan yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menilai apa hal yang ditargetkan dari sebuah negara, penting untuk fokus pada kepentingan vital negara tersebut. Kaum realis berpendapat bahwa semua negara mempunyai “kepentingan nasional inti” untuk menjamin integritas fisik dan teritorial mereka. Sedangkan, kaum liberal berpendapat bahwa negara-negara tidak hanya peduli pada keamanan tetapi juga kepentingan ekonomi mereka.

Selama ini para ahli hubungan internasional secara konsisten telah menafsirkan kepentingan negara sebagai indikator yang tunggal. Namun, Charles Chong-Han Wu beranggapan berbeda. Charles Chong-Han Wu, seorang akademisi dengan fokus bidang kajian diplomasi dan politik Asia Timur, mendefinisikan kepentingan nasional ke dalam konteks teori hubungan internasional dan kebijakan luar negeri. Wu menilai jika konsep kepentingan

²⁰ Hans J. Morgenthau, ‘Another “Great Debate”: The National Interest of the United States. *American Political Science Review*’, 46.4 (1952), 964 <<http://www.jstor.org/stable/1952108>>.

nasional akan sulit dipahami jika hanya melihat dari satu indikator kepentingan inti saja. Wu sepakat dengan pandangan Nye jika kepentingan negara merupakan “*slippery concept*” yang tidak cukup dijelaskan hanya dalam satu dimensi, melainkan memerlukan analisis yang lebih multi dimensi. Melalui tulisannya yang berjudul *Understanding the Structures and Contents of National Interests : An Analysis of Structural Equation Modeling*, Wu menafsirkan konsep *national interest* secara lebih terukur dan komprehensif. Menurutnya, kepentingan nasional harus terdiri dari beberapa tujuan umum dan indikator kebijakan individual untuk menentukan keterkaitan antara konsep kepentingan dan tujuan mendasar lainnya dari sebuah kebijakan. Wu secara empiris menjelaskan bahwa pendistribusian kepentingan suatu negara dalam keputusan kebijakan luar negeri didasarkan pada tiga dimensi penting, yakni keamanan, ekonomi, dan masyarakat.²¹

Berbeda dengan pemikiran realisme umumnya, Wu berpendapat jika kepentingan negara tidak dapat diungkapkan melalui kepentingan kekuasaan atau keamanan saja, tetapi juga mencakup kepentingan perekonomian negara. Hal ini sejalan dengan pandangan neorealisme bahwa keamanan nasional dan kesejahteraan ekonomi memiliki peran penting bagi stabilitas negara. Selain itu, terdapat juga “kepentingan komunitas” sebagai kepentingan ketiga dalam pemikiran Wu tentang struktur dan substansi kepentingan negara. Pandangan Wu seputar kepentingan komunitas berakar dari karya Karl Deutsch (1957), di mana Deutsch percaya bahwa keterlibatan masyarakat dalam satu komunitas atau lembaga yang sama dapat menguatkan rasa kebersamaan satu sama lain, dan

²¹ Charles Chong-Han Wu, ‘Understanding the Structures and Contents of National Interests : An Analysis of Structural Equation Modeling’, *The Korean Journal of International Studies*, 15.3 (2017): 393 <<https://doi.org/10.14731/kjis.2017.12.15.3.391>>.

identifikasi timbal balik ini dapat membuat kepentingan kolektif menjadi relevan dari tujuan masing-masing. Singkatnya, akan lebih mudah bagi negara-negara untuk menghasilkan kepentingan serupa ketika mereka bergabung dalam satu organisasi dan memiliki tujuan bersama atau kesamaan pandangan. Pendekatan Wu menunjukkan bahwa dalam analisis geopolitik modern, tidak cukup hanya mempertimbangkan sisi keamanan dan kekuasaan semata, tetapi juga penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor ekonomi dan sosial turut memengaruhi dinamika kepentingan nasional suatu negara secara keseluruhan.



Gambar 1. 1 *National Interest* menurut Charles Chong-Han Wu

Sumber: Charles Chong-Han Wu, 'Understanding the Structures and Contents of National Interests : An Analysis of Structural Equation Modeling.'

Berikut adalah tiga dimensi penting dalam kepentingan nasional sebuah negara, diantaranya:²²

1) *Security*: Aspek pertama dari kepentingan nasional ialah masalah keamanan.

Hubungan antara nilai-nilai inti dan kelangsungan hidup negara menjadi

²² Wu, 'Understanding the Structures and Contents of National Interests : An Analysis of Structural Equation Modeling,' 404–412.

pertimbangan krusial untuk memperbarui kepentingan nasionalnya. Negara-negara yang memiliki banyak permasalahan keamanan akan lebih menekankan pada peningkatan kemampuan nasional, mempertahankan formasi aliansi serupa, atau bahkan mengembangkan (atau memperoleh) senjata nuklir untuk mengatasi masalah keamanan utama mereka. Berikut tiga indikator yang merepresentasikan kepentingan keamanan suatu negara, yakni:

- a. *Alliance*: Indikator ini merujuk pada hubungan formal yang dibentuk oleh suatu negara terhadap negara lain dalam rangka mencapai tujuan keamanan bersama. Aliansi dapat terwujud dalam bentuk perjanjian militer, kesepakatan pertahanan, atau perjanjian keamanan lainnya. Aliansi penting dalam menganalisis kepentingan keamanan suatu negara karena dapat menjadi salah satu strategi dalam memperkuat pertahanan dalam menghadapi ancaman bersama.
- b. *National Capabilities*: Indikator ini merujuk pada tingkat kemampuan militer suatu negara dalam melindungi kedaulatan dan keamanan nasionalnya serta bagaimana negara berperan untuk memunculkan pengaruh dan eksistensinya di sistem internasional. Melalui indikator *national capabilities*, indikasi kepentingan keamanan suatu negara akan terlihat dari sejauh mana negara mampu melindungi diri sendiri dan berkontribusi dalam agenda internasional.
- c. *Nuclear Weapons Possession*: Indikator ini merujuk pada status kepemilikan senjata nuklir oleh suatu negara. Negara-negara dengan perolehan senjata nuklir memiliki kepentingan khusus untuk mempertahankan dan mengamankan cadangan persenjataan ini, karena

mereka mendapatkan keuntungan strategis dan keamanan. *Nuclear weapons possession* penting dalam menganalisis kepentingan keamanan nasional suatu negara karena dapat menjadi faktor penentu dalam strategi keamanan dan diplomasi negara di tingkat internasional.

2) *Community*: Aspek kedua dari kepentingan nasional adalah masyarakat.

Institusi politik dan rasa kebersamaan antar masyarakat dapat saling memperkuat satu sama lain, di mana negara-negara dengan ideologi serupa akan membangun komunitas masyarakat yang erat dengan kepentingan kolektif. Kepentingan masyarakat menunjukkan bahwa negara-negara dengan standar domestik dan internasional yang serupa, termasuk skor pemerintahan, skala pembangunan, dan aktivitas dalam organisasi internasional yang serupa, akan memiliki kepentingan yang dekat. Berikut tiga indikator kepentingan masyarakat dari suatu negara:

a. *Intergovernmental Organization*: Indikator ini mengidentifikasi apakah negara tersebut adalah bagian dari organisasi internasional atau tidak. Anggota organisasi internasional seringkali memiliki tujuan bersama dan membagi kepentingan tertentu dalam forum multilateral. Melalui partisipasi dalam organisasi internasional, negara dapat mengejar kepentingan masyarakat melalui kerjasama dengan negara lain di organisasi yang sama.

b. *Domestic Development*: Indikator ini merujuk pada tingkat kemajuan pembangunan sebuah negara, dari segi ekonomi dan sosial. Hal ini dapat mencakup tingkat GDP per kapita, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan indikator lain yang mencerminkan

kesejahteraan negara tersebut. Melalui indikator *domestic development*, suatu negara dapat mengejar kepentingan komunitas dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

c. *Democracy*: Indikator ini merujuk pada tipe rezim politik yang dianut oleh negara, khususnya apakah negara tersebut adalah demokrasi atau otoriter. Negara-negara dengan rezim politik yang serupa cenderung memiliki pandangan dan kepentingan yang sama dalam hubungan internasional.

3) *Economic*: Aspek ketiga dari kepentingan nasional yaitu permasalahan ekonomi, yang merupakan prediktor signifikan terhadap perdagangan, penanaman modal asing, dan keterbukaan pasar. Ketika interdependensi ekonomi menjadi semakin populer di antara setiap negara, mereka akan berupaya mencegah segala potensi kerugian melalui integrasi ekonomi. Beberapa mekanisme yang terkait dengan kapitalisme mampu memitigasi penyebab perang antarnegara. Menurut Wu, kepentingan ekonomi suatu negara akan selalu berfokus pada tiga indikator berikut:

a. *International Trade*: Indikator ini merujuk pada aktivitas perdagangan antar-negara, seperti ekspor dan impor maupun kesepakatan perdagangan. Tingkat dan jenis perdagangan antara negara ini dapat mencerminkan seberapa besar negara-negara tersebut memprioritaskan kepentingan ekonomi dalam hubungannya dengan negara lain.

b. *Market Openness*: Indikator ini merujuk pada tingkat keterbukaan suatu negara terhadap lingkungan eksternal dan liberalisasi pasar. Negara-negara yang lebih terbuka terhadap pasar internasional cenderung memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara

yang menganut proteksionisme. Melalui *market openness*, suatu negara akan mengejar kepentingan ekonominya dengan membuka akses pasar domestik dan berpartisipasi aktif dalam perdagangan internasional.

- c. *Foreign Direct Investment*: Indikator ini mencerminkan tingkat arus modal asing yang masuk ke suatu negara untuk tujuan investasi. FDI dapat mencerminkan minat suatu negara dalam menarik atau pun melakukan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui FDI, suatu negara berusaha untuk menjadikan investasi asing sebagai alat untuk memperkuat ekonomi domestik, mengembangkan sektor-sektor strategis dan mendapatkan akses lebih ke pasar internasional.

Dalam tulisannya tersebut, Wu mengklasifikasikan analisis faktor kepentingan nasional berdasarkan dua jenis metodologi. Pertama adalah *explanatory factor analysis* (EFA). Metodologi ini banyak digunakan pada variabel yang dikumpulkan yang tidak memiliki tolak ukur faktor yang konkret berdasarkan dengan data yang diamati. EFA seringkali digunakan untuk reduksi data dan eksplorasi dimensi. Umumnya, metode EFA ini digunakan untuk penelitian secara kualitatif. Sedangkan, kedua adalah *confirmatory factor analysis* (CFA). Dalam CFA, peneliti mencoba menguji model faktor hipotetis dengan hasil yang didapatkan secara statistik, yang berarti menggunakan variabel yang ada untuk mengonfirmasi model. CFA dapat digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi model yang lebih tepat dengan proses uji hipotesis. Metode CFA seringkali diperuntukkan dalam penelitian kuantitatif.

Konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Wu ini seringkali menjadi pedoman dan alat analisis utama dalam banyak kasus negara-negara di

kawasan Asia Timur karena mampu memberikan kerangka yang komprehensif dalam menilai kepentingan dasar negara-negara di kawasan ini. Pendekatan Wu yang berfokus pada tiga dimensi utama—keamanan, komunitas masyarakat, dan ekonomi—sejalan dengan kebutuhan strategis negara-negara di Asia Timur untuk menyeimbangkan stabilitas internal, pertumbuhan ekonomi, dan keamanan regional. Asia Timur, sebagai kawasan dengan dinamika geopolitik negara-negara besar yang intens disertai dengan ketergantungan ekonomi yang tinggi, menuntut pendekatan analisis yang dapat menguraikan kepentingan nasional dalam konteks interaksi dengan kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Terkait hal ini, konsepsi kepentingan nasional oleh Wu menjadi alat yang efektif untuk memahami kompleksitas prioritas kebijakan luar negeri di Asia Timur dan memberikan panduan yang sistematis dalam merespon tantangan regional maupun global. Sejalan dengan penjelasan tersebut, peneliti melihat bahwa model kepentingan nasional menurut Wu memiliki relevansi dengan topik penelitian yang diulas. Dengan konsep ini, peneliti akan mengkaji seperti apa relasi kepentingan nasional Korea Selatan terhadap ASEAN dalam implementasi kebijakan NSP melalui tiga dimensi utama kepentingan negara yang telah diuraikan sebelumnya.

1.8 Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan meramalkan fenomena penelitian.²³ Berikut beberapa metode penelitian yang digunakan dalam menyusun hasil penelitian ini, diantaranya:

²³ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990): 3.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Penelitian kualitatif adalah prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁴ Penelitian kualitatif bersifat naratif dengan menjelaskan informasi yang mendalam tentang masalah yang akan dipecahkan. Sedangkan, metode deskriptif analitis berusaha memberikan deskripsi permasalahan secara sistematis berdasarkan fakta-fakta aktual yang didapatkan dengan disertai telaah kritis terhadap masalah tersebut.²⁵ Dalam penelitian ini, deskripsi tersebut akan terlihat melalui pembahasan kepentingan yang hendak dicapai Korea Selatan terhadap ASEAN dalam kebijakan NSP.

1.8.2 Batasan Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman atas penelitian ini diperlukan batasan agar topik penelitian dapat dielaborasi dengan lebih terfokus dan jelas. Peneliti membagi batasan penulisan atas dua jenis, yaitu:

- a. Batasan isu: Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji kepentingan yang ingin dicapai Korea Selatan terhadap ASEAN dalam kebijakan luar negeri *New Southern Policy*.
- b. Batasan waktu: Penelitian ini difokuskan pada rentang waktu berlakunya *New Southern Policy*, terhitung dari tahun 2017 sebagai awal terbentuknya kebijakan ini hingga tahun 2022 sebagai akhir dari masa implementasi NSP.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. by Tjun Surjaman, 7th Ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung, 1996): 3.

²⁵ Nur Khoiri, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Ragam, Model & Pendekatan* (Semarang: Southeast Asian Publishing, 2015): 4.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan objek yang perilakunya akan dianalisis atau dikenal juga sebagai variabel dependen. Sedangkan, unit eksplanasi adalah objek yang memengaruhi perilaku unit analisis yang digunakan, disebut juga dengan variabel independen. Kemudian, tingkat analisis ialah unit yang menjadi fokus tingkatan antara dua objek utama dalam penelitian.²⁶ Melalui bukunya *Theory of International Politics*, Waltz menjelaskan jika terdapat tiga tingkat analisis dalam fenomena hubungan internasional, yaitu individu yang terfokus pada objek manusia, negara yang terfokus pada objek domestik sebuah negara, dan sistem internasional yang terfokus pada struktur dalam tatanan internasional.²⁷ Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diidentifikasi jika unit analisis dalam penelitian ini adalah kepentingan Korea Selatan terhadap ASEAN dan unit eksplanasi ialah kebijakan luar negeri *New Southern Policy*, serta tingkat analisisnya berada pada tingkat sistem internasional karena hal tersebut melibatkan interaksi dari banyak aktor dalam tatanan internasional, yang dalam konteks ini ialah Korea Selatan dan negara-negara ASEAN, di mana tidak hanya terfokus kepada satu atau dua negara saja.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan merujuk kepada sumber data primer dan data sekunder yang relevan dengan implementasi kebijakan luar negeri Korea

²⁶ Paul D'Anieri, *International Politics: Power and Purpose in Global Affairs*, 2nd ed. (Canada: Nelson Education, Ltd., 2012): 19 <https://archive.org/details/isbn_1111346038/mode/lup>.

²⁷ Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics*, University of California, Berkeley (Philippines: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1979) <<https://doi.org/10.1590/s0034-73292004000100012>>.

Selatan, *New Southern Policy*, di ASEAN. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan banyak bentuk data, seperti wawancara, observasi, dokumen, dan berbagai informasi lainnya daripada hanya mengandalkan satu sumber saja.²⁸ Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam teknik studi kepustakaan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mengacu pada sumber orisinal yang dihasilkan oleh orang-orang yang mengalami langsung peristiwa tertentu atau perilaku yang sedang diteliti dan belum mengalami penafsiran dari pihak ketiga.²⁹ Sumber primer dapat berupa dokumen, arsip, maupun laporan saksi mata. Sedangkan, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara dan telah memuat interpretasi dari pihak ketiga.

Sumber primer dalam penelitian ini berasal dari situs resmi milik pemerintah Korea Selatan dan portal berita negara-negara ASEAN yang memuat dokumen dan arsip digital tentang implementasi NSP terhadap *ASEAN Member States*, seperti *e-booklet* atau laporan digital seputar informasi NSP yang diterbitkan oleh *Presidential Committee on New Southern Policy* dalam laman <https://overseas.mofa.go.kr/asean-en/index.do>, ASEAN-Republic of Korea Cooperation Fund (AKCF) melalui <https://www.aseanrofund.com/>, situs Embassy of the Republic of Indonesia in Seoul, Republic of Korea melalui laman <https://kemlu.go.id/seoul/en>, Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea melalui laman <https://www.mofa.go.kr/>, ASEAN Secretariat melalui laman <https://asean.org/>, informasi seputar *New Southern Policy* melalui laman <http://webarchives.pa.go.kr/19th/www.nsp.go.kr/kor/main/main.do>, dan situs-

²⁸ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (California: SAGE Publications, Inc., 2014): 234 <<https://pubhtml5.com/brxd/vjzn/basic/>>.

²⁹ Endang Mulyatiningsih, *Metode Penelitian Dasar Untuk Penulisan Tugas Akhir Di Perguruan Tinggi*, ed. by Abdul Kholiq (Yogyakarta: RELASI INTI MEDIA (Anggota IKAPI), 2023): 198.

situs bilateral antara Korea Selatan dan negara-negara ASEAN yang memuat informasi kerja sama yang dilakukan oleh Korea Selatan dan ASEAN.

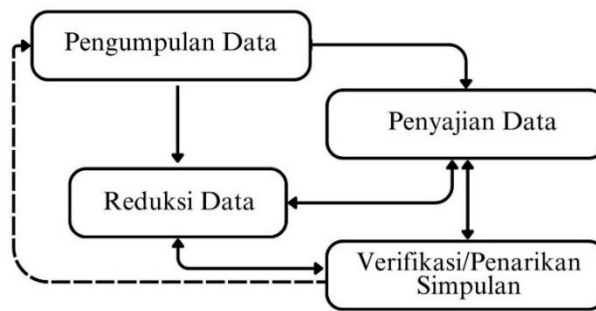
Untuk sumber sekunder sendiri, peneliti merujuk pada beberapa artikel jurnal dan berita dari media massa *online* yang akan di seleksi berdasarkan pertimbangan bahwa sumber tersebut merupakan sumber yang terpercaya dan memiliki kelengkapan data mengenai *New Southern Policy*, Korea Selatan, *ASEAN Member States*, dan aspek-aspek lain yang berhubungan. Beberapa tulisan yang peneliti rujuk sebagai sumber sekunder ialah artikel jurnal *Korea's New Southern Policy: Motivations of 'Peace Cooperation' and Implications for the Korean Peninsula* yang ditulis oleh Lee Jaehyon, dan artikel jurnal dari Hoang Thi Ha dan Glenn Ong berjudul *Assessing the ROK's New Southern Policy towards ASEAN* yang peneliti gunakan untuk melihat dinamika yang melibatkan Korea Selatan dan ASEAN, serta alasan dibalik kemunculan NSP sebagai kebijakan luar negeri Korea Selatan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Moleong mendefinisikan analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan hipotesa yang disarankan oleh data.³⁰ Miles dan Huberman membagi teknik analisis data ke dalam tiga tahap secara bersamaan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).³¹

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 103.

³¹ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, ed. by Rebecca Holland, *SAGE Publications*, 2nd ed. (California: SAGE Publications, Inc., 1994): 10.



Gambar 1. 2 Komponen Analisis Data Kualitatif

Sumber: Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*.

Tahap pertama dalam proses analisis data adalah reduksi data (*data reduction*). Di tahap reduksi ini, data akan melalui proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi ke dalam catatan lapangan tertulis atau transkripsi. Dalam proses penelitian, tahapan ini sudah dimulai ketika peneliti memutuskan kerangka konseptual mana, kasus apa, pertanyaan penelitian apa, dan pendekatan pengumpulan data mana yang harus dipilih. Reduksi atau transformasi data akan berlanjut hingga laporan akhir selesai dibuat. Tahap selanjutnya ialah penyajian data (*data display*) yang bertujuan untuk menyajikan sekumpulan informasi secara terorganisir dan terkompresi yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan dan tindakan. Untuk proses penyajian data, semua informasi akan dirancang menjadi bentuk yang lebih ringkas dengan menarik hubungan antara data dengan kerangka penelitian sehingga analis dapat melihat kesimpulan yang masuk akal. Seperti yang terlihat dalam tabel di atas, tahap reduksi dan penyajian data akan berlangsung terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Tahapan terakhir ialah penarikan kesimpulan final dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) untuk mengevaluasi dan memvalidasi temuan data yang didapatkan.

Sejalan dengan tahapan analisis data tersebut, peneliti mengolah data dan informasi terkait penelitian ini melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Pertama, reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari dan memilah data berdasarkan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian, diantaranya ialah kebijakan luar negeri, kepentingan negara, hubungan Korea Selatan dan ASEAN, Semenanjung Korea, *New Southern Policy*, *Northern Policy* (Nordpolitik), *great power*, *THAAD*, *middle power*, *strategic partnership*, *special strategic partnership*, *comprehensive strategic partnership*, kerja sama bilateral, dan kerja sama Korea Selatan dan ASEAN. Sejalan dengan penetapan garis besar topik penelitian tersebut, peneliti juga menetapkan alur dan kerangka penelitian dengan mengidentifikasi fokus, pertanyaan, batasan, konsep, dan metode penelitian untuk mereduksi data yang telah didapatkan.

Di tahapan reduksi ini, peneliti menggunakan konsep kepentingan nasional (*national interest*) dari Charles Chong-Han Wu sebagai pedoman alur berpikir dalam menyederhanaan data penelitian. Wu mengklasifikasikan pendistribusian kepentingan sebuah negara dalam sistem internasional atas tiga dimensi utama, dengan masing-masing dimensi kepentingan memuat tiga indikator hal yang dituju atas tindakan suatu negara, yaitu kepentingan keamanan (*alliance*, *national capabilities*, dan *nuclear weapons possession*), kepentingan komunitas (IGO, *domestic development*, dan *democracy*), dan ekonomi (*international trade*, *market openness*, FDI). Setiap negara memiliki porsi dan perhatian yang berbeda dalam masing-masing dimensi kepentingan nasional tersebut.

Berpedoman kepada konsep dari Wu ini, kepentingan Korea Selatan terhadap ASEAN dalam kebijakan NSP akan di analisis berdasarkan indikator-

indikator dari tiga dimensi kepentingan. Untuk mengkaji kepentingan keamanan, peneliti akan melihat apakah terdapat determinan Korea Selatan untuk membangun aliansi, memperluas kemampuan nasional, hingga menysar kepemilikan senjata nuklir dengan ASEAN dan negara-negara anggotanya atau tidak. Selanjutnya, terkait kepentingan komunitas, peneliti akan melihat bagaimana dorongan Korea Selatan terhadap ASEAN melalui daya tarik ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional, tingkat pembangunan ekonomi, dan tipe rezim yang dianut oleh ASEAN dan negara anggotanya. Sedangkan, untuk kepentingan ekonomi, peneliti akan melihatnya dari tujuan perdagangan internasional, dorongan keterbukaan pasar, dan peluang *foreign direct investment* Korea Selatan di ASEAN. Analisis ini akan didasarkan pada kerja sama yang telah diupayakan oleh Korea Selatan dan ASEAN di bawah kerangka kebijakan NSP.

Selanjutnya, untuk proses penyajian data dilakukan dengan memaparkan hubungan antara Korea Selatan dan ASEAN berdasarkan kerangka penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk kemudian diperoleh hal yang melatarbelakangi Korea Selatan untuk mencetuskan NSP dan kepentingan mana saja yang mewakili tindakan Korea Selatan ke ASEAN dalam kebijakan NSP. Korelasi ini akan dilihat melalui bentuk implementasi kebijakan NSP dalam kerja sama antara Korea Selatan dan ASEAN melalui ASEAN Plus Three, ASEAN Regional Forum, maupun kerja sama secara bilateral dengan negara-negara anggota ASEAN itu sendiri, seperti dalam kerja sama *special strategic partnership*, dan *comprehensive strategic partnership* di bidang ekonomi, keamanan, dan sosial-budaya. Terakhir, pada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti memvalidasi dan mengulas hasil penelitian untuk mendapatkan

kesimpulan umum dari jawaban pertanyaan penelitian, terkait apa kepentingan yang disasar oleh Korea Selatan terhadap ASEAN dalam kebijakan NSP.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari sembilan bagian pengantar penelitian, meliputi latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian yang dilakukan.

BAB II **Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terbentuknya *New Southern Policy***

Bab kedua akan secara rinci membahas terkait kehadiran kebijakan NSP sendiri, khususnya dalam konteks kondisi-kondisi yang mendasari pembentukan kebijakan ini. Sebuah kebijakan luar negeri tidak akan terbentuk tanpa ada faktor tertentu yang mendasarinya. Sejalan dengan hal tersebut, terlebih dahulu secara umum akan dijelaskan bagaimana karakteristik kebijakan luar negeri Korea Selatan yang berkembang selama ini.

BAB III **Implementasi *New Southern Policy* di kawasan ASEAN**

Bab ketiga menjelaskan tentang implementasi NSP dalam kemitraan Korea Selatan dan ASEAN selama lima tahun berjalan, dari tahun 2017 hingga 2022. Implementasi kebijakan ini akan ditinjau dari

bidang kerja sama antara Korea Selatan dengan negara-negara ASEAN yang didasarkan pada 3 Pilar dan 16 Tugas Kebijakan NSP.

BAB IV *Kepentingan Korea Selatan melalui New Southern Policy di kawasan ASEAN*

Bab ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, dengan mengkaji tentang kepentingan yang berupaya dicapai oleh Korea Selatan di kawasan ASEAN melalui implementasi kebijakan NSP. Kepentingan tersebut ditinjau melalui tindakan strategis yang dilakukan oleh Korea Selatan, baik dari sisi keamanan, komunitas, maupun ekonomi berdasarkan analisis konsep kepentingan nasional oleh Charles Chong-Han Wu.

BAB V *Penutup*

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penelitian, dengan memuat kesimpulan dan saran dari proses dan hasil penelitian yang diperoleh dari bab sebelumnya terkait kepentingan Korea Selatan dalam implementasi *New Southern Policy* di kawasan ASEAN.

